

PERUBAHAN RENJA DISHUB KOTA DUMAI

Tahun Anggaran 2025





KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta menuntun dan membimbing kita sehingga Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2025. Perubahan Rencana kerja ini nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Perubahan Renja ini, sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dumai, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Perhubungan,



SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Pertama.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
	26
BAB IV. PENUTUP	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Adapun proses/tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

- a. Rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, mencakup:
 - analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW I tahun berkenaan; dan
 - penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.



Rancangan perubahan Renja, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan TW I tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup.

Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diterima.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah: Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali kota melalui Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda dan menyampaikannya kembali ke Bappeda. Verifikasi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
3. Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah: Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Wali kota melalui Sekretaris



Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Dokumen perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang tentunya harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta RPJMD Kota Dumai Tahun 2021- 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum perumusan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi



- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
 14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D).
 15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025, antara lain :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisi tentang reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; dan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini melampirkan rancangan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Pertama

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai dilakukan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai maupun RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan TW I dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir Tahun 2025. Jika sampai dengan TW I Tahun 2025 ditemukan program/kegiatan/subkegiatan yang target-targetnya tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai di akhir tahun rencanan. Berikut terlampir hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota DUmair Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I



Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Dumai
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		457,684,576,420	206,150,255,245			100,588,813,345		15,474,872,521		-		-		-		15,474,872,521		221,775,127,766				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		457,684,576,420	206,150,255,245			100,588,813,345		15,474,872,521		-		-		-		15,474,872,521		221,775,127,766				
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan	2722	149,312,468,393	1158	78,013,517,607	198	35,679,711,297	0.25	4,589,323,612	-	-	-	-	-	0.25	4,589,323,612	1,158	82,602,841,219	42.55%	55.32%	DISHUB	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	270,740,000	16	136,894,500	6	dokumen	17,700,000	-	-	-	-	-	-	-	16	136,894,500	55.17%	50.56%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	122,930,000	7	71,086,500	2	dokumen	7,680,000	-	-	-	-	-	-	-	7	71,086,500	63.64%	57.83%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	78,275,000	3	38,275,000	1	dokumen	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	38,275,000	60.00%	48.90%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13	69,535,000	6	27,533,000	3	laporan	4,830,000	-	-	-	-	-	-	-	6	27,533,000	46.15%	39.60%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15	49,538,472,046	9	26,923,284,171	3	laporan	21,082,327,040	-	2,704,033,819	-	-	-	-	-	2,704,033,819	9	29,627,317,990	60.00%	59.81%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	49,261,518,446	82	26,802,467,872	82	orang/bulan	21,043,673,040	0.21	2,692,179,819					0.21	2,692,179,819	82.21	29,494,647,691	91.35%	59.87%		

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025



		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	57,075,448,936	9	30,894,416,272	3	laporan	9,464,151,420	0.25	1,834,460,793	-	-	-	-	-	0.25	1,834,460,793	9.25	32,728,877,065	61.67%	57.34%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat	5	19,987,000	3	12,166,000	1	laporan	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12,166,000	60.00%	60.87%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	6,161,034,450	3	2,406,667,466	1	laporan	1,249,814,000	0.17	110,927,891	-	-	-	-	-	0.17	110,927,891	3.17	2,517,595,357	63.33%	40.86%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	50,894,427,486	3	28,475,582,806	1	laporan	8,212,587,420	0.08	1,723,532,902	-	-	-	-	-	0.08	1,723,532,902	3.08	30,199,115,708	61.67%	59.34%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1081	17,470,123,771	434	8,659,467,792.30	138	unit	2,030,886,713	-	50,829,000	-	-	-	-	-	-	50,829,000	434	8,710,296,792	40.15%	49.86%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182	5,081,711,189	73	2,525,318,962	37	unit	431,068,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	2,525,318,962	40.11%	49.69%	
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	827	6,444,401,320	329	3,352,863,070	96	unit	778,943,260	-	50,829,000	-	-	-	-	-	-	50,829,000	329	3,403,692,070	39.78%	52.82%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66	5,144,011,262	28	2,431,561,390.30	5	unit	820,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2,431,561,390.30	42.42%	47.27%	
		Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak	1099	308,372,108,027	5847	128,136,737,638	2,812	64,909,102,048	294	10,885,548,908.85	-	-	-	-	-	294	10,885,548,908.85	6141	139,022,286,546.84	55.86%	45.08%	DISHUB
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	43	4,241,321,335	23	2,354,042,382	8	dokumen	811,315,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2,354,042,382	53.49%	55.50%	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	40	4,041,321,335	23	2,354,042,382	8	dokumen	811,315,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2,354,042,382	57.50%	58.25%	
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1075	269,861,139,499	5736	109,360,239,976.94	2,749	unit	61,561,969,093.04	294	10,885,548,908.85	-	-	-	-	-	294	10,885,548,908.85	603	120,245,788,885.79	56.05%	44.56%	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	21	36,375,717,006	10	16,465,413,507.32	6	unit	13,493,136,037.04	-	658,177,995.85	-	-	-	-	-	-	658,177,995.85	1	17,123,591,503.17	47.62%	47.07%	
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7744	100,032,844,593	4449	27,834,750,597.93	2380	unit	19,742,135,040	294	3,548,089,890	-	-	-	-	-	294	3,548,089,890.00	4743	31,382,840,487.93	61.25%	31.37%	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	41	5,307,320,431	14	1,476,451,880.24	7	unit	885,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1,476,451,880.24	34.15%	27.82%	

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025



		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3	229,109,600	-	-	1	laporan	6,969,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Hasil Andalalin	3	99,109,600	-	-	1	laporan	6,969,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	7,149,170,922	3	3,107,124,838	1	laporan	705,683,500	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,107,124,838	60.00%	52.23%
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5	5,949,170,922	3	3,107,124,838	1	laporan	465,727,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,107,124,838	60.00%	52.23%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	2	1,200,000,000	-	-	1	unit	239,956,500	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	150,000,000	-	-	1	dokumen	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	150,000,000	-	-	1	dokumen	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%
TOTAL					458,284,576,420.00		206,300,255,245.38			100,588,813,345.02									15,474,872,520.85			



Dumai, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Perhubungan

SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013



Tahun 2025 merupakan tahun keempat pada Periodesasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, maka dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tahun 2025 merupakan tahun keempat Periodesasi RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, artinya sampai dengan tahun 2024 minimal capaian masing-masing target keuangan program/kegiatan/sub kegiatan adalah 60%. Berdasarkan evaluasi realisasi fisik dan keuangan sampai dengan tahun 2025 sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.1 diatas, maka beberapa kegiatan/sub kegiatan yang diprediksi tidak mencapai target akhir yang direncanakan pada dokumen perencanaan jangka menengah diantaranya:

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- g. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- h. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemeliharaan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik



2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, melalui kegiatan dan sub kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), melalui kegiatan dan sub kegiatan:
1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Sampai dengan Triwulan I tahun 2025, tidak ada Sub Kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan melebihi target yang direncanakan



4. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Keterbasan anggaran, sehingga target kinerja keluaran yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal artinya adanya penyesuaian terhadap target mengikuti besaran pagu yang telah ditetapkan.
 - Adanya kesalahan dalam menetapkan target kinerja pada saat penyusunan dokumen Renstra.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai
 - Dinas Perhubungan Kota Dumai harus memperhatikan indikator output sub-sub kegiatan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan (Renja) perangkat daerah, sehingga terjadi keselarasan antara perencanaan dan penganggaran;
 - Ketersediaan data dukung yang valid dan lengkap sangat dibutuhkan untuk menyusun target pada dokumen perencanaan agar tepat dalam menentukan indikator, baik target maupun pendanaan indikatifnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026, terdapat 4 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut pada Tahun 2025. Keempat indikator yang dimaksud antara lain:

1) Persentase Prasarana Transportasi

Target indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 78%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2) Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang

Target indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 75%. Sub Kegiatan pendukung sasaran yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan



Bermotor, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3) Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Target indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 75%. Sub kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

4) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Target indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 1.198,23 : 98.423 km/unit. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Tabel analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat pada tabel T-C. 30 sebagai berikut:



Tabel. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Dumai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	58%	68,5%	76,5%	84,5%	51,5%	77.5%	76,5%	84,5%	
2.	Persentase Prasarana Transportasi	-	-	56%	67%	78%	89%	56%	67%	78%	89%	Kinerja Tercapai sesuai target yang ditetapkan
3.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	-	-	61%	68%	75%	82%	89%	63%	75%	82%	Melebihi Capaian Kinerja dikarenakan Jumlah kendaraan yang melaksanakan pengujian Kir melebihi target yang ditetapkan pada tahun berkenaan
5.	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	-	60%	70%	75%	80%	88%	88%	75%	80%	Melebihi Capaian Kinerja dikarenakan Jumlah Penyediaan LLAJ melebihi target yang ditetapkan pada tahun berkenaan
8.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	-	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	-	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1.198,23 km: 90.081 unit	1.198,23 km: 94.117 unit	1.198,23 km: 98.424 unit	1.198,23 km:102.873 unit	1.198,23 km: 94.842 unit	1.198,23 km: 96.069 unit	1.198,23 km: 98.424 unit	1.198,23 km:102.873 unit	Kinerja Belum Tercapai dikarenakan tingginya peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan di kota Dumai



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi diidentifikasi melalui permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Akses terhadap pelayanan transportasi dan pembangunan infrastruktur belum optimal	Infrastruktur transportasi belum lengkap	Belum optimalnya pengadaan dan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
		Belum optimal kapasitas dan kualitas pelayanan di bidang perhubungan	Kapasitas dan kualitas aparatur di bidang perhubungan belum memadai
		Kurangnya koordinasi, konsolidasi, konsultasi, dan komunikasi yang melibatkan kelompok masyarakat dan <i>stakeholder</i> perhubungan	Kurangnya penertiban, pembinaan, penyuluhan, dan edukasi yang melibatkan unsur masyarakat serta lintas sektoral transportasi Adanya kewenangan yang tumpang tindih
2	Pelayanan angkutan umum dalam kota yang masih sangat kurang	Kurangnya minat masyarakat menggunakan jasa angkutan umum	Masyarakat lebih tertarik menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum
		Belum adanya angkutan umum yang memadai dan menangani kebutuhan sesuai trayek	Belum adanya regulasi terkait penetapan jaringan trayek dan belum adanya subsidi dari pemerintah



		Banyaknya angkutan ilegal dan tidak bertrayek yang masih beroperasi	Belum dilakukan penindakan terhadap angkutan ilegal yang dan tidak bertrayek ditambah lagi adanya aturan yang masih tumpang tindih
3	Belum adanya Terminal Penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan	Belum terlaksananya pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Lokasi pembangunan terminal Penumpang Tipe C yang belum ditetapkan
4	Penyediaan perlengkapan jalan yang belum optimal	Perlengkapan jalan yang ada saat ini masih belum diperbarui / konvensional	Belum dilakukan pembaruan (<i>upgrade</i>) menyesuaikan kemajuan teknologi saat ini
5	Database Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang belum ada	Belum memiliki Dokumen Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)	Belum dilakukannya survei terhadap Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di Kota Dumai
6	Belum tersedianya dokumen perencanaan transportasi yang menjadi kewenangan daerah	Proses perencanaan tidak berjalan dengan maksimal	Perangkat daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan target dalam proses perencanaan
7	Belum optimalnya pengelolaan dan penataan perparkiran	Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dan penataan perparkiran serta pengaruh pola kebijakan yang ada	Belum terlaksananya penyesuaian regulasi dengan kebutuhan perkembangan kota
8	Kurangnya kesadaran berlalu lintas dari masyarakat Kota Dumai	Masih kurangnya sosialisasi mengenai aturan keselamatan berlalu lintas di jalan	Belum dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pengajar tentang keselamatan berlalu lintas
9	Besarnya volume pergerakan kendaraan tonase berat dari/ke arah Kota Dumai yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui	Belum ada sanksi yang tegas terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan Masih tingginya overloading angkutan barang	Kurangnya penertiban, pembinaan, penyuluhan, terhadap pengusaha angkutan barang serta regulasi yang belum maksimal diterapkan Tidak memadainya fasilitas kantong parkir angkutan barang

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026



Sedangkan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan Visi, Misi, dan Program pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Visi, Misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kapasitas dan kualitas aparatur di bidang perhubungan belum memadai	Kesadaran masyarakat akan keselamatan dan keamanan berlalu lintas masih rendah	Telah tersedianya perlengkapan jalan guna mendukung keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas	Masyarakat berperan serta dalam memberi masukan dalam mengevaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Belum tersedianya terminal penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan pembangunan terminal penumpang Tipe C melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C, Sub Kegiatan Pembangunan



Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Umum dan Fasilitas Penunjang

2. Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (becak motor, kendaraan online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan penetapan jaringan trayek melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota, sub kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
3. Masih rendahnya penertiban dan pengendalian angkutan orang dan/atau barang di Kota Dumai, maka rekomendasi dan catatan strategis yaitu memprioritaskan kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota;
4. Masih belum optimalnya pengelolaan parkir, maka rekomendasi dan catatan strategis yaitu memprioritaskan pengawasan terpadu perparkiran di Kota Dumai dan melakukan sosialisasi perparkiran di tepi jalan umum melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Perumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:



Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ Tingkat Kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum tersedianya terminal penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan	Angkutan umum tergeser dengan adanya transportasi berbasis Online yang semakin menjamur	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas antar wilayah	Memprioritaskan pembangunan terminal penumpang Tipe C melalui program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan Pengelaan Terminal Tipe C, Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Umum dan Fasilitas Penunjang
Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (becak motor, kendaraan online)	Trayek angkutan yang tidak tertata dengan baik	Tingginya tingkat penggunaan angkutan pribadi dibandingkan angkutan umum	Memprioritaskan penetapan jaringan trayek melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota, sub kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi	Masih rendahnya penertiban dan pengendalian angkutan orang dan/atau barang di Kota Dumai	Tingkat kepatuhan perusahaan transporter dan pemilik barang	Tingginya pelanggaran <i>Over Dimension Over Loading</i> (ODOL)	Memprioritaskan kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang



kewenangan Daerah		masih rendah	sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan	melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota
Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah	Masih belum optimalnya pengelolaan parkir	Sistem Perparkiran di tepi jalan umum yang tidak tertata dengan baik sehingga menimbulkan kemacetan di jam-jam sibuk	Belum tertatanya sistem perparkiran di tepi jalan umum	Memprioritaskan pengawasan terpadu perparkiran di Kota Dumai dan melakukan sosialisasi perparkiran di tepi jalan umum melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik



BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, maka pada Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Dumai melaksanakan 2 Program 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program Non Urusan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Program Urusan yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kelompok sasaran ASN Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk Program Non Urusan dan Masyarakat Kota Dumai untuk 1 (satu) Program Urusan. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yakni sebesar Rp 100.588.813.345,00 atau terdapat penambahan sebesar Rp 18.964.172.356,00 dengan rincian sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sumber dana “Dana Alokasi Umum (DAU)” sebesar Rp 35.679.711.297,00 dengan Pagu RKPD Murni 2025 sebesar Rp 34.142.695.476,00 atau selisih sebesar Rp 1.537.015.821 pada Sub Kegiatan berikut :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan sumber dana “Dana Alokasi Umum (DAU)” sebesar Rp 64.909.102.048,00 dengan Pagu RKPD Murni 2025 sebesar Rp 84.260.290.225,00 atau selisih sebesar Rp 19.351.188.177,00 pada sub kegiatan berikut:
 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
 2. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.



Adapun Usulan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Praktiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12-10)	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	677 Unit			160 Unit	96 Unit	1,500,000,000.00	1,100,027,000.00	778,943,260.00	-	721,056,740.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	200 Unit	1,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit			2 Unit	-	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Unit	300,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 Unit			15 Unit	5 Unit	900,000,000.00	885,000,000.00	820,875,000.00	-	79,125,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	15 Unit	900,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.09 0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																			
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	4 Ha			2 Ha		50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Ha	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2 15 02	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PRESENTASE TERSEDIANYA PRASANA PERHUBUNGAN DARAT YANG LAYAK	95 %			95 %	95%	84,260,290,225.00	59,920,163,480.00	64,909,102,048.00	-	19,351,188,177.00					95 %	67,648,614,245.00		
2	15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	40 Dokumen			1 Dokumen	8 Dokumen	550,000,000.00	700,000,000.00	811,315,955.00	-	261,315,955.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	6Dokumen	550,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.01 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	37 Dokumen			1 Dokumen	8 Dokumen	500,000,000.00	650,000,000.00	811,315,955.00	-	311,315,955.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.01 0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14947Unit			4015 Unit	2749 Unit	74,833,290,225.00	54,468,343,480.00	61,561,969,093.00	-	13,271,321,132.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4015Unit	57,913,614,245.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02 0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	19 Unit			5 Unit	6 Unit	7,850,000,000.00	7,850,000,000.00	13,493,136,037.00	-	5,643,136,037.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Unit	840,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7744 Unit			2000 Unit	2380 Unit	34,271,288,453.00	20,718,337,500.00	19,742,135,040.00	-	14,529,153,413.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2000 Unit	27,835,470,018.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12-10)	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	35 Unit			10 Unit	7 Unit	2.500.000.000,00	1.384.573.000,00	885.790.000,00	-	1.614.210.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	10 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekangan Jalan																
			Jumlah Perlekangan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7152 Unit			2000 Unit	356 Unit	30.212.001.772,00	24.505.432.980,00	27.440.908.016,00	-	2.771.093.756,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2000 Unit	28.238.144.227,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2Unit	1 Unit	-	300.000.000,00	200.000.000,00	-	-	300.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0Unit	0,00	
2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit			1 Unit	-	300.000.000,00	200.000.000,00	-	-	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	11 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000.000,00	1.987.500.000,00	662.480.000,00	-	1.737.520.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2Dokumen	2.600.000.000,00	
2	15	02	2.04	0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	380.000.000,00	-	1.220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	387.500.000,00	282.480.000,00	-	517.520.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	2.002.000.000,00	70.000.000,00	49.950.000,00	-	1.952.050.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2Dokumen	2.100.000.000,00	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12-10)	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	65 Unit			2 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	50.000.000,00	49.950.000,00	-	950.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penguji Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Sumber Daya Manusia Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Orang			5 Orang	-	90.000.000,00	20.000.000,00	-	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdapat	200 Unit			100 Unit	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	100 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen			500 Dokumen	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	500 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisa Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan			1 Laporan	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Laporan	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	69 Unit			20 Unit	-	550.000.000,00	-	-	550.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 Unit	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan			1 Laporan	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan			1 Laporan	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Praktiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12-10)	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen			4 Dokumen	2 Dokumen	1.650.000.000,00	1.351.240.000,00	1.010.734.500,00	-	639.265.500,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4Dokumen	2.150.000.000,00		
	2 15 02 2.06 0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	806.944.500,00	-	193.055.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.06 0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																			
			Jumlah Terbanggunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4 Unit			2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.06 0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	-	100.000.000,00	73.490.000,00		-	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.06 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	27.750.000,00	30.290.000,00	-	69.710.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.06 0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen			1 Dokumen	49 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	73.500.000,00	-	26.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.06 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	-	200.000.000,00	50.000.000,00		-	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	9 Dokumen			3 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000,00	42.000.000,00	6.969.000,00	-	228.031.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3Dokumen	265.000.000,00		
	2 15 02 2.07 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12-10)	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	6,969,000.00	-	13,031,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																	
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	4 Orang			2 Orang	-	65,000,000.00	22,000,000.00		-	65,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Orang	65,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	2 Laporan			1 Laporan	-	50,000,000.00	-		-	50,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin																	
			Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	4 Dokumen			1 Dokumen	-	100,000,000.00	-		-	100,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	9Dokumen	3 Dokumen	-	160,000,000.00	-		-	160,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3Dokumen	160,000,000.00	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan			1 Laporan	-	50,000,000.00	-		-	50,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																	
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan			1 Laporan	-	30,000,000.00	-		-	30,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	30,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																	
			Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Orang			2 Orang	-	30,000,000.00	-		-	30,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Orang	30,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12-10)	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Uji Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan			1 Laporan	-	50,000,000.00			-	50,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1,765,000,000.00	1,001,080,000.00	705,683,500.00	-	1,059,316,500.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1Laporan	1,635,000,000.00	
2	15 02 2.09 0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000.00	600,000,000.00	465,727,000.00	-	534,273,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	1,200,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit			1 Unit	1 Unit	765,000,000.00	401,080,000.00	239,956,500.00	-	525,043,500.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	435,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen			2 Dokumen	1 Dokumen	165,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	65,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2Dokumen	150,000,000.00	
2	15 02 2.10 0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.10 0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	-	65,000,000.00			-	65,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen			2 Dokumen	-	100,000,000.00			-	100,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		2Dokumen	75,000,000.00	
2	15 02 2.11 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12-10)	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	-	50,000,000.00			-	50,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		1 Dokumen	25,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	-	50,000,000.00			-	50,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	-	100,000,000.00			-	100,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1Laporan	50,000,000.00	
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Unit			1 Unit	-	100,000,000.00			-	100,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
3	2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PRESENTASE TERSEDIAANYA PRASANA PERHUBUNGAN LAUT YANG LAYAK SESUAI KEWENANGAN KOTA	20 %	-	150,000,000.00	100,000,000.00		-	150,000,000.00						20 %	0,00	
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Dokumen		1 Dokumen	-	150,000,000.00	100,000,000.00		-	150,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0Dokumen	0,00	
2	15	03	2.10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal																
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Dokumen			1 Dokumen	-	150,000,000.00			-	150,000,000.00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
4	2	15	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPAIAN	PRESENTASE PENYEDIAAN RENCANA INDUK INFRASTRUKTUR PERKERETAAPAIAN YANG TERINTEGRASI SESUAI DENGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100 %	-	1,000,000,000.00			-	1,000,000,000.00						100 %	0,00	
			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapain	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapain	3Dokumen		2 Dokumen	-	900,000,000.00			-	900,000,000.00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapain																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12-10)	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen			1 Dokumen	-	700.000.000,00			-	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 05 2.01 0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	Rencana Induk Perkeretaapian																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen			1 Dokumen	-	100.000.000,00			-	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 05 2.01 0003	Pengendalian Pelaksanaan	Rencana Induk Perkeretaapian																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Laporan			1 Laporan	-	100.000.000,00			-	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Laporan	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen			1 Dokumen	-	100.000.000,00			-	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 05 2.02 0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	-	100.000.000,00			-	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
							J U M L A H		119,552,985,701.00	86,567,226,980.00	100,588,813,345.00	- 18,964,172,356.00							98,951,309,721.00		



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun 2025 sebagai bentuk rencana implementasi dari RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berbagai indikasi program dan kegiatan telah disusun sebagai upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Dumai.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian pada Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Dumai;
2. Kegiatan yang belum terakomodir pada Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 dikarenakan keterbatasan anggaran.

Kaidah-kaidah pelaksanaan dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Rencana tindak lanjut berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia; Peningkatan koordinasi lintas sektor dan juga antar bidang; Peningkatan koordinasi horizontal dengan perangkat daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan koordinasi vertikal dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.



Dumai, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Perhubungan,

SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013